

Outline Journal of Economic Studies

Journal homepage: <https://journal.outlinepublisher.com/index.php/OJES>

Research Article

Analysis of Factors Affecting the Number of Poor People in South Tapanuli Regency, North Sumatra 2010-2022

Analisi Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara 2010-2022

Ade Andriani Batubara ¹, Haddad Alwi ²

Universitas Negeri Medan

*Correspondence: andrianiade491@gmail.com

Keywords:

Poverty
Human Development Index
Population
Life Expectancy

Abstract

This study aims to look at the factors that influence the number of poor people in South Tapanuli Regency. The data used is secondary data obtained through the Central Bureau of Statistics for North Sumatra Province. The data taken is the number of poor people (Y), the Human Development Index (X1), the total population (X2), and life expectancy (X3) with the observation year 2010-2022. The analytical model used in this study is multiple linear regression. The results of the analysis show that the Human Development Index (X1) and life expectancy (X3) have a negative and significant effect on the number of poor people in South Tapanuli Regency. While the population has a positive but not significant effect on the number of poor people in South Tapanuli Regency. The acquisition of an R-squared value of 0.855797 indicates that the Human Development Index (X1), population (X2), and life expectancy (X3) can simultaneously explain the poverty variable in Kab. South Tapanuli in 2010-2022 amounted to 85.5797% while the remaining 14.4203% is explained by other variables not included in this study.

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Di hampir semua negara berkembang, standar hidup dari sebagian besar penduduknya cenderung sangat rendah, jika dibandingkan dengan standar hidup orang-orang di negara kaya, atau dengan golongan elit di negara mereka sendiri. Standar hidup yang rendah tersebut terwujud salah satunya dalam bentuk tingkat pendapatan yang sangat rendah atau kemiskinan (Todaro, 2004).

Kemiskinan memang bukan hanya masalah ketidakmampuan secara ekonomi semata, akan tetapi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup keluarganya maupun untuk diri sendiri. Termasuk juga adanya perbedaan antara seseorang maupun kelompok terhadap yang lainnya dalam menjalani kehidupan yang lebih bermartabat.

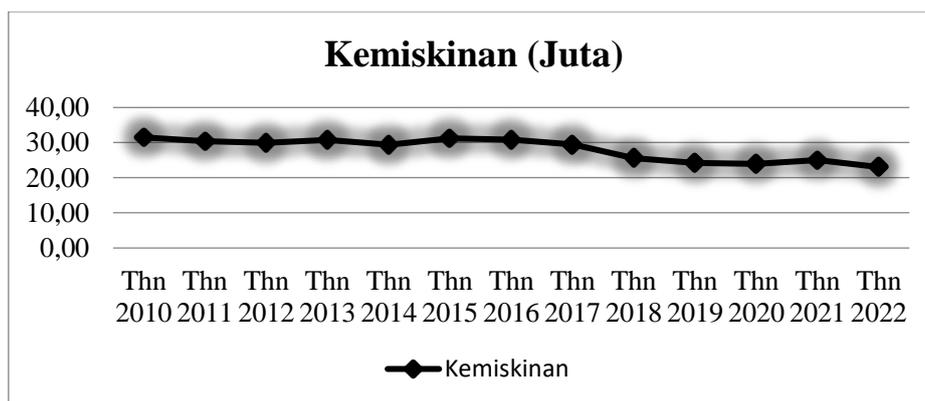
Melihat semakin urgennya penanganan permasalahan Kemiskinan di Indonesia, maka melalui Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 juncto Nomor 34 dan Nomor 8 Tahun 2002 dibentuklah Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) yang berfungsi sebagai forum lintas pelaku dalam melakukan koordinasi perencanaan, pembinaan, pemantauan dan pelaporan seluruh upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk lebih mempertajam keberadaan Komite Penanggulangan Kemiskinan, maka pada tanggal 10 September 2005 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Keberadaan TKPK diharapkan melanjutkan dan memantapkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh KPK.

Program penanggulangan kemiskinan yang pernah dilaksanakan antara lain P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), TPSP-KUD (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa), UEDSP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam), PKT (Pengembangan Kawasan Terpadu), IDT (Inpres Desa Tertinggal), P3DT (Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal), PPK (Program Pengembangan Kecamatan), P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan), PDMDKE (Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi, P2MPD (Proyek Pembangunan Masyarakat dan Pemerintah Daerah), dan program pembangunan sektoral telah berhasil memperkecil dampak krisis ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

Selain itu beberapa lembaga keuangan milik pemerintah (Badan Usaha Milik Negara) maupun milik swasta atas inisiatif sendiri menyelenggarakan pula program keuangan mikro dengan berbagai variasi dan kekhasannya masing-masing. Demikian pula kalangan usaha nasional non-lembaga keuangan, baik milik pemerintah (BUMN) maupun milik swasta telah mengambil inisiatif melakukan upaya penanggulangan kemiskinan melalui beragam program, mulai dari bantuan sosial hingga bantuan ekonomi.

Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai salah satu kabupaten di Sumatera Utara pun selalu berupaya dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan ini. Hal tersebut diwujudkan melalui program – program yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Program dan kegiatan sebetulnya sudah banyak dikerjakan, baik berupa program yang pendanaannya bersumber dari APBN, APBD Provinsi Sumatera Utara maupun yang berasal dari APBD Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berbagai usaha penanggulangan kemiskinan yang dilakukan hingga saat ini belum membuahkan hasil yang memuaskan. Hal ini terbukti dari masih tingginya angka kemiskinan di kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin di Kab. Tapanuli Selatan 2010-2022

Dari Gambar 1. Tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dari tahun 2010-2022 mengalami fluktuasi. Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2015 sampai dengan 2020 penduduk miskin di Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh berhasilnya kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk menurunkan jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Tetapi pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin naik. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 gelombang 2 yang terjadi di pertengahan tahun 2021 sehingga pertumbuhan ekonomi melambat akibat mobilitas yang sangat terbatas. Dan pada akhir 2021 sampai dengan 2022 pertumbuhan ekonomi berangsur

pulih yang menyebabkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tapanuli Selatan ikut menurun dari 25,01 juta jiwa di 2021 menjadi 23,05 juta jiwa di 2022.

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan, maka perlu untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Beberapa pendapat dan teori mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin di suatu wilayah. Menurut (Sjafi'i dan Hidayanti, 2009) Bahwa tersedianya SDM yang berkualitas ini merupakan syarat penting berlangsungnya pembangunan ekonomi secara berkesinambungan. Berdasarkan definisi Sjafi'i dan Hidayanti dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah hal yang sangat penting bagi pembangunan suatu perekonomian secara berkesinambungan, dengan seperti itu jika suatu negara ingin membangun perekonomian yang berjangka panjang dan saling berkesinambungan maka sangat penting untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia yang akan meningkatkan kualitas SDM di suatu negara (Mukhtar, Saptono, & Arifin, 2019). Artinya IPM berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin, karena meningkatnya IPM akan meningkatkan kualitas SDM di suatu negara yang pada akhirnya mengurangi jumlah penduduk miskin.

Hal ini sejalan dengan penelitian Mukhtar, Saptono, & Arifin (2019) dan penelitian Levinia Kotambunan, Sutomo Wim Palar, & Richard L.H Tumilaar (2015) yang menemukan hasil bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syaifullah dan Nazarudin (2017) menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Jumlah penduduk juga dapat mempengaruhi jumlah kemiskinan. Jumlah penduduk yang besar apabila diikuti dengan kualitas yang memadai merupakan modal pembangunan yang handal, namun demikian apabila kualitasnya rendah justru akan menjadi beban pembangunan. Sedangkan meningkatnya jumlah penduduk mempengaruhi banyak hal yaitu meningkatnya kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Disamping itu, jumlah penduduk yang terlampau besar akan menguras kas pemerintah yang sudah sangat terbatas untuk menyediakan berbagai pelayanan kesehatan, ekonomi, dan sosial bagi generasi baru. Melonjaknya beban pembiayaan atas anggaran pemerintah tersebut jelas akan mengurangi kemungkinan dan kemampuan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup generasi dan mendorong terjadinya transfer kemiskinan kepada generasi mendatang yang berasal dari keluarga berpenghasilan menengah ke bawah. Artinya pengaruh jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk miskin tergantung pada kondisi di wilayah masing-masing. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Wahuniarti (2008) serta penelitian yang dilakukan oleh Damanik dan Sidauruk (2020) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin adalah tingkat kesehatan yang di lihat melalui angka harapan hidup. Menurut Dores (2014), perbaikan kesehatan penduduk akan meningkatkan produktifitas mereka terutama yang bekerja. Hal ini disebabkan karena meningkatnya efisiensi kerja dimana kemampuan fisik dan mental mereka lebih baik sehingga hasil yang mereka terima akan lebih besar. Hal ini tentunya juga sangat berpengaruh baik pada perbaikan kesejahteraan masyarakat yang nantinya tercermin dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin didaerah tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dores (2014) menunjukkan bahwa angka harapan hidup memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wongdesmiwati (2009) yang menemukan bahwa angka harapan hidup berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

Melihat adanya *gap* penelitian, maka penelitian ini mencoba untuk melihat pengaruh dari Indeks Pembangunan Manusia, jumlah penduduk dan angka harapan hidup terhadap jumlah penduduk miskin dengan lokasi penelitian yang sebelumnya masih jarang diteliti yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara tahun 2010-2022.

Kajian Pustaka

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty threshold). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, Pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. (BPS, 2016).

Ada beberapa indikator kemiskinan yang biasanya digunakan antara lain :

1. Kemiskinan Relatif

Seseorang dikatakan berada dalam kelompok kemiskinan relative jika pendapatannya berada di bawah pendapatan disekitarnya atau dalam kelompok masyarakat tersebut di lapisan paling bawah meskipun pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok namun karena dibandingkan masyarakat disekitarnya pendapatannya dinilai rendah maka orang tersebut termasuk miskin.

2. Kemiskinan Absolut

Dapat diketahui dari kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, pemukiman, Pendidikan dan kesehatan. Jika pendapatan seseorang di bawah pendapatan minimal untuk memenuhi kebutuhan pokok maka orang tersebut dikatakan miskin.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan ini biasanya disebabkan oleh keadaan kultur di masyarakat, serta dapat dikaitkan dengan budaya masyarakat yang menerima kemiskinan yang terjadi pada dirinya, bahkan tidak merespon pendapat ataupun masukan dari pihak lain yang ingin membantunya keluar dari kemiskinan tersebut.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan yang di sebabkan oleh struktur ataupun system ekonomi yang tidak berpihak kepada yang miskin, sehingga mengakibatkan munculnya masalah – masalah struktur ekonomi yang menyampingkan peranan orang miskin.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk mendapatkan akses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. IPM dihitung berdasarkan data – data yang dapat menggambarkan komponen – komponen yang terkait yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan; angka rata – rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah yang mewakili bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup lebih layak. (BPS, 2017).

Indeks pembangunan manusia merupakan indikator strategis yang banyak digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Demikian juga kemajuan program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut. Indeks pembangunan manusia digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. (Kotambunan, 2016).

Jumlah Penduduk

Pada umumnya perkembangan penduduk di negara sedang berkembang sangat tinggi dan besar jumlahnya. Masalah pertumbuhan penduduk bukanlah sekedar masalah jumlah, masalah penduduk juga menyangkut kepentingan pembangunan serta kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Dalam konteks pembangunan, pandangan terhadap penduduk terpecah dua, ada yang menganggapnya sebagai penghambat pembangunan, ada pula yang menganggap sebagai pemacu pembangunan.

Alasan penduduk dipandang sebagai penghambat pembangunan, dikarenakan jumlah penduduk yang besar dan dengan pertumbuhan yang tinggi, dinilai hanya menambah beban pembangunan. Jumlah penduduk yang besar akan memperkecil pendapatan perkapita dan menimbulkan masalah ketenagakerjaan (Dumairy, 1996).

Penduduk sebagai pemacu pembangunan karena populasi yang lebih besar sebenarnya adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga menciptakan skala ekonomi dalam produksi yang akan menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga pada gilirannya akan merangsang output atau produksi agregat yang lebih tinggi lagi. Dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berarti tingkat kemiskinan akan turun (Todaro dan Smith, 2006).

Menurut Lipsey (dalam Ida BM, 2003) pada tingkat pengetahuan dan ketersediaan faktor produksi tertentu, jumlah penduduk dapat berpengaruh pada tingkat output perkapita. Setiap orang semasa hidupnya akan sekaligus menjadi konsumen dan produsen. Karena jumlah penduduk berkaitan dengan pendapatan perkapita, maka dapat didefinisikan suatu konsep teoritis, yaitu populasi optimal yang memaksimalkan pendapatan perkapita

Meskipun terdapat pertentangan mengenai konsekuensi positif dan negatif yang ditimbulkan oleh laju pertumbuhan penduduk, namun selama beberapa dekade mulai muncul gagasan baru yang dapat disetujui kedua belah pihak. Gagasan tersebut dikemukakan oleh Robert Cassen (dalam Todaro dan Smith, 2006) yaitu sebagai berikut:

1. Pertumbuhan penduduk bukan merupakan penyebab utama rendahnya taraf hidup masyarakat, kesenjangan pendapatan atau terbatasnya kebebasan dalam membuat pilihan yang merupakan masalah pokok dalam suatu negara.
2. Persoalan kependudukan tidak semata-mata menyangkut jumlah akan tetapi juga meliputi kualitas hidup dan kesejahteraan materiil.
3. Namun, pertumbuhan penduduk yang cepat memang mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Laju pertumbuhan penduduk yang terlampau cepat, meskipun bukan merupakan penyebab utama dari keterbelakangan, harus disadari hal itu merupakan salah satu faktor penting penyebab keterbelakangan di banyak negara.

Angka Harapan Hidup

Berdasarkan website resmi Dinas Kesehatan kabupaten Jayapura, harapan hidup merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa medatang. Angka harapan hidup merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya disuatu negara. Dengan evaluasi tersebut pemerintah dapat meningkatkan derajat kesehatan bagi para penduduknya.

Apabila ditemukan Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah maka pemerintah harus mengadakan lebih banyak program pembangunan, kesehatan, dan program sosial lainnya seperti kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan. Sementara peningkatan Angka Harapan Hidup menunjukkan bahwa bayi-bayi telah terjamin kesehatan dan kemiskinan

sudah diatasi lebih baik. Pada negara berkembang, biasanya Angka Harapan Hidup masih berkisar 40-60 tahun. Namun dalam negara maju, Angka Harapan Hidup relatif lebih tinggi hingga mencapai umur 90 tahun.

Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik dengan lokasi penelitian di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu Jumlah Penduduk Miskin (Y), Indeks Pembangunan Manusia (X1), Jumlah Penduduk (X2), dan Angka Harapan Hidup (X3) dengan tahun amatan 2010-2022. Data kemudian dianalisis dengan metode analisis regresi linier berganda untuk mengetahui arah dan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat serta uji asumsi klasik untuk memberikan kepastian apakah persamaan regresi yang di dapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten.

Adapun persamaan umum dari analisis ini adalah :

$$\text{Kemiskinan} = \beta_0 - \beta_1 \text{IPM} + \beta_2 \text{Penduduk} - \beta_3 \text{AHH} + e$$

Dimana :

β_0 = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Kefisien regresi

e = *Error term*

Hasil Dan Pembahasan

Hasil

Hasil analisis regresi linier berganda dan uji asumsi klasik dirangkum dalam tabel berikut :

Tabel 1
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dan Asumsi Klasik

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	121.9642	220.6069	0.552858	0.5938
IPM	-1.697553	0.484416	-3.504331	0.0067
PENDUDUK	6.306436	20.49575	0.307695	0.7653
AHH	-0.885262	0.326614	-2.710422	0.0240
R-squared	0.855797	Durbin-Watson stat		1.400348
F-statistic	17.80394	Prob(F-statistic)		0.000399
Normalitas	Prob (Jarque-Bera)			0.506225
Autokorelasi	Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test			0.0892
Heteroskedastisitas	Prob (Heteroskedasticity Test: Glejser)			0.3580
Multikolinearitas (X1)	Centered Variance Inflation Factors			6.322373
Multikolinearitas (X2)	Centered Variance Inflation Factors			5.335987
Multikolinearitas (X3)	Centered Variance Inflation Factors			1.494857

1. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Prob(Jarque-Bera) untuk uji normalitas adalah $0,506225 > 0,05$. Hal ini berarti data terdistribusi secara normal dan tidak terdapat masalah uji normalitas dalam model penelitian ini.

2) Uji Autokorelasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Prob. untuk uji autokorelasi adalah $0,0892 > 0,05$, yang berarti bahwa tidak terjadi masalah uji autokorelasi dalam model penelitian ini.

3) Uji Heteroskedastisitas

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Prob. untuk uji heteroskedastisitas adalah $0,3580 > 0,05$, yang berarti bahwa tidak terjadi masalah uji heteroskedastisitas dalam model penelitian ini.

4) Uji Multikolinearitas

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai *Centered Variance Inflation Factors* untuk ketiga variabel bebas berada dibawah 10 (*Centered VIF* < 10). Hal ini berarti tidak terjadi masalah uji multikolinearitas dalam model penelitian ini.

2. Uji Hipotesis

1) Uji Simultan

Dari tabel hasil analisis diketahui bahwa nilai Prob(F-statistic) sebesar $0,000399 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (X1), penduduk (X), dan angka harapan hidup (X3) secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Kab. Tapanuli Selatan tahun 2010-2022.

2) Uji Parsial

a. Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan variabel IPM terhadap kemiskinan di Kab. Tapanuli Selatan dengan nilai Prob. $0,0067 < 0,05$ yang artinya H_a diterima.

b. Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa ada pengaruh positif namun tidak signifikan antara variabel penduduk terhadap kemiskinan di Kab. Tapanuli Selatan dengan nilai Prob. $0,7653 > 0,05$, yang artinya H_a diterima.

c. Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan antara variabel Angka Harapan Hidup terhadap kemiskinan di Kab. Tapanuli Selatan dengan nilai Prob. $0,0240 < 0,05$, yang artinya H_a diterima.

3) Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai R-squared sebesar 0.855797. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (X1), penduduk (X2), dan angka harapan hidup (X3) secara simultan dapat menjelaskan variabel kemiskinan di Kab. Tapanuli Selatan tahun 2010-2022 sebesar 85,5797% sementara sisanya 14,4203% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

4) Pembahasan Model Analisis

Persamaan yang diperoleh dari hasil analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$\text{Kemiskinan} = 121.9642 - 1.697553 (\text{IPM}) + 6.306436(\text{Penduduk}) - 0.885262 (\text{AHH}) + e$$

a. Konstanta sebesar 121.9642 menunjukkan bahwa jika variabel IPM, penduduk, dan angka harapan hidup nilainya konstan, maka jumlah penduduk miskin di Kab. Tapanuli Selatan adalah sebesar 121.9642.

b. Nilai koefisien IPM sebesar -1,697553 menunjukkan bahwa IPM memberikan pengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kab. Tapanuli Selatan tahun 2010-2022. Jika IPM meningkat

sebesar 1% maka akan mengurangi jumlah penduduk miskin di Kab. Tapanuli Selatan sebanyak 1,97553 orang. Begitu pula sebaliknya, penurunan IPM sebesar 1% akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,97553 orang.

- c. Nilai koefisien penduduk sebesar 6,306436 menunjukkan bahwa jumlah penduduk memberikan pengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Kab. Tapanuli Selatan tahun 2010-2022. Jika jumlah penduduk meningkat sebesar 1%, maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebanyak 6,30643 orang. Begitu pula sebaliknya, penurunan jumlah penduduk sebesar 1% akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 6,30643 orang.
- d. Nilai koefisien angka harapan hidup sebesar -0,885262 menunjukkan bahwa jumlah penduduk memberikan pengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kab. Tapanuli Selatan tahun 2010-2022. Jika angka harapan hidup meningkat sebesar 1%, maka akan mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 0,885262 orang. Begitu pula sebaliknya, penurunan angka harapan hidup akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebanyak 0,885262.

Pembahasan

1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kab. Tapanuli Selatan tahun 2010-2022, yang artinya hipotesis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap jumlah penduduk miskin di Kab. Tapanuli Selatan diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukhtar, Saptono, & Arifin (2019) yang menemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dengan tahun amatan 2011-2014. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Kotambunan, dkk (2016) yang menemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara tahun 2005-2014.

Tingginya tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan memberikan peningkatan terhadap kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan berdampak baik terhadap penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin. IPM juga merupakan faktor penentu kemajuan suatu bangsa. Melalui IPM, akan diketahui apakah sebuah negara termasuk ke dalam kategori negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang serta bisa digunakan oleh pemerintah untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup masyarakatnya. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di negaranya sebagai salah satu strategi dalam pengentasan kemiskinan.

2. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Hasil analisis data menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kab. Tapanuli Selatan tahun 2010-2022, yang artinya hipotesis pengaruh jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk miskin di Kab. Tapanuli Selatan diterima.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Wahuniarti (2008) yang menyatakan bahwa apabila jumlah penduduk semakin banyak, maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Penduduk yang dimaksud yaitu mereka orang yang menetap dan bertempat tinggal di wilayah tertentu. bertambahnya jumlah penduduk dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Jumlah penduduk yang meningkat akan menimbulkan banyaknya jumlah angkatan kerja (Damanik & Sidauruk, 2020). Serta penelitian yang dilakukan oleh Damanik dan Sidauruk (2020) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara dengan tahun amatan 2008-2017.

Hasil yang tidak signifikan terjadi karena pengaruh jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk miskin terpecah menjadi dua yaitu sebagai penghambat pembangunan dan sebagai pemicu pembangunan. Penduduk dapat menjadi penghambat pembangunan jika tingkat pertumbuhan penduduk tinggi tidak disertai dengan kualitas sumber daya manusia yang baik serta penyerapan tenaga kerja yang baik, dinilai hanya akan menambah beban pembangunan bagi sebuah negara.

Sedangkan penduduk sebagai pemacu pembangunan karena populasi yang lebih besar sebenarnya adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga menciptakan skala ekonomi dalam produksi yang akan menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga pada gilirannya akan merangsang output atau produksi agregat yang lebih tinggi lagi. Dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berarti tingkat kemiskinan akan turun (Todaro dan Smith, 2006).

3. Pengaruh Angka Harapan Hidup Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Hasil analisis data menunjukkan bahwa angka harapan hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kab. Tapanuli Selatan tahun 2010-2022, yang artinya hipotesis pengaruh angka harapan hidup terhadap jumlah penduduk miskin di Kab. Tapanuli Selatan diterima.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dores (2014) menunjukkan bahwa angka harapan hidup memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat dengan tahun amatan 2005-2011.

Angka harapan hidup digunakan pemerintah sebagai sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan para penduduknya. Apabila ditemukan Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah maka pemerintah harus mengadakan lebih banyak program pembangunan, kesehatan, dan program sosial lainnya seperti kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2010-2022 dengan nilai Prob. $0,0077 < 0,05$.
2. Jumlah penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2010-2022 dengan nilai Prob. $0,7653 > 0,05$.
3. Jumlah angka harapan hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2010-2022 dengan nilai Prob. $0,0240 < 0,05$.
4. Diperoleh nilai R-squared sebesar 0.855797. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (X1), penduduk (X2), dan angka harapan hidup (X3) secara simultan dapat menjelaskan variabel kemiskinan di Kab. Tapanuli Selatan tahun 2010-2022 sebesar 85,5797% sementara sisanya 14,4203% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini antara lain:

1. Melihat Indeks Pembangunan Manusia yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tapanuli Selatan diharapkan agar pemerintah dapat membuka banyak lapangan pekerjaan guna menyerap jumlah tenaga kerja yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pemerintah juga dapat membuat beberapa program atau strategi yang dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia seperti meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Melihat pengaruh positif jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tapanuli Selatan akan lebih baik jika pemerintah membuat Kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan baik

- melalui kelahiran maupun kebijakan tentang migrasi di Kabupaten Tapanuli Selatan. Tingkat pertumbuhan penduduk juga perlu diseimbangkan dengan penyediaan lapangan pekerjaan agar penduduk tidak menjadi penghambat dalam pengentasan kemiskinan.
3. Melihat pengaruh negatif dan signifikan angka harapan hidup terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tapanuli Selatan, akan lebih baik jika pemerintah setempat untuk lebih meningkatkan kualitas kesehatan masyarakatnya misalnya dengan melakukan sosialisasi kesehatan sehingga dapat meningkatkan perkiraan angka harapan hidup masyarakatnya.
 4. Dalam upaya mengurangi jumlah kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan, pemerintah dapat melakukan upaya dengan cara peningkatan sumber daya manusia, sumber daya alam dan meningkatkan teknologi. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka akan mengurangi jumlah penduduk miskin dan pemerintah dapat melakukan upaya seperti peningkatan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan mengupayakan stabilitas harga, dimana ketiga aspek tersebut merupakan komponen penting dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Daftar Pustaka

- Anggriansyah, B. (2016). Analisis Pengaruh Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Gini Terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 - 2013. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, UII.
- Antara. (2017, Maret 25). Sistem Pendidikan Yogyakarta Dinilai Jauh Dari Sempurna. *Sinarharapan*. Diakses pada 8 April 2023 melalui www.sinarharapan.com
- Damanik, R. K., & Sidauruk, S.A. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Darma Agung*, 28(3), 358-368.
- Dores, E. (2014). Pengaruh Angka Melek Huruf dan Angka Harapan Hidup Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Propinsi Sumatera Barat. *ECONOMICA: Journal of Economic and Economic Education*, 2(2), 12-133.
- Dumairy.(1996). *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Erlangga.
- Gunawan, K., Suandana, N., & Mekarsari, N. K. A. (2020). Analisis Ekonomi Makro Dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan (Sutdi Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng Bali). *Widya Amerta*, 7(1), 19–32.
- Hardana, A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Industri Kecil Di Kota Padangsidempuan Dan Kabupaten Tapanuli Selatan. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 4(1)
- Hilmi., Marumu, M.N. H., Ramlawati., Peuru, C. D. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Tolitoli. *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 20-27.
- <https://dinker.jayapura.go.id>
- <https://sumut.bps.go.id>
- Kotambunan, L., Palar, S. W., & Richard, L. (2016). “Analisis pengaruh benalnja modal dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhdap Kemiskinan di sulawasi utara (dalam tahun 2005-2014)”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efesiensi*, 6(1).
- Mukhtar, S., Saptono, A., & Arifin, A.S.(2019). The Analysis of the Effects of Human Development Index and Opened Unemployment Levels to the Poverty in Indonesia. *Jurnal Ecoplan*, 2(2), 77-89.
- Pamela. (2020, Oktober 2020). Begini Cara Pemerintah Tingkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *Ajaib*. Diakses pada 12 April 2023 melalui <https://ajaib.co.id/begini-cara-pemerintah-tingkatkan-indeks-pembangunan-manusia/>
- Siregar, Hermanto dan Dwi Wahyuniarti. 2008. Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Jumlah Penduduk. Laporan Penelitian. Institut Pertanian Bogor.
- Sjafi’I, A., & Hidayati, N. A. (2009). Genjot anggaran pendidikan-rendam kemiskinan, dalam gemari. edisi 101/tahun X/juni 2009: 68-69.
- Sumatera Utara. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2010). *Sumatera Utara Dalam Angka*. <https://sumut.bps.go.id>

- Sumatera Utara. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2011). *Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka*. <https://sumut.bps.go.id>
- Sumatera Utara. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2012). *Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka*. <https://sumut.bps.go.id>
- Sumatera Utara. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2013). *Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka*. <https://sumut.bps.go.id>
- Sumatera Utara. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2014). *Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka*. <https://sumut.bps.go.id>
- Sumatera Utara. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2015). *Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka*. <https://sumut.bps.go.id>
- Sumatera Utara. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2016). *Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka*. <https://sumut.bps.go.id>
- Sumatera Utara. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2022). *Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka*. <https://sumut.bps.go.id>
- Sumatera Utara. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2023). *Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka*. <https://sumut.bps.go.id>
- Sumatera Utara. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2018). *Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka 2018*. <https://sumut.bps.co.id>
- Syaifullah, A., Malik, N. (2017). Pengaruh IPM dan PDRB Terhadap Tingkat kemiskinan di ASEAN-4. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1),107-119.
- Tisniwati. B. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 32-46.
- Todaro, M. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. (8th ed). Penerbit Erlangga.
- Todaro, M., Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. 9th ed. Penerbit Erlangga.
- Wongdesmiwati. (2009). Pertumbuhan Ekonomidan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Analisis Ekonometrika*.